

PEMBINAAN LANJUT BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DI PALEMBANG DAN MAKASSAR

AFTER CARE SERVICES FOR DISABILITAS IN PALEMBANG AND MAKASSAR

Nurdin Widodo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur.

E-Mail: widodonurdin@rocketmail.com

ABSTRACT

Study evaluation about in Palembang and Makassar is one of step social rehabilitation in Social Institution for disability. The aims of the research are describe the implementation program in this institution and to know the influenced of push and pull factors. Method of the research is qualitative descriptive which that was by Interview, Observation and documentation Study. The research findings indicated the activities of after care services only reflected the physical, mental and social development after back to their family. Kind of activity are filling the progress form, record of motivation for former client and their families, proposal preparation guidance, aid of the development of productive economic activities, and how connecting the needs of former client with the resource System. To Starting the process of after care services are preparation, implementation and reporting. The result of Study showed the positive influence of social rehabilitation process for improved the social function which conducted by PSBD (Social Institution dor Disability). Futhermore, the condition of family and community influences the former client achivement. To sum up, to knowing the progress of former client, after care of former client must be continued, and giving the priority same with the social rehabilitation process in PSBD. The ideal condition was all of former client need the after care program to know their progress.

Keywords : *fisical disability sosial institutions , after care services*

ABSTRAK

Pembinaan lanjut Bagi Penyandang Disabilitas Tubuh di Palembang dan Makassar merupakan studi evaluasi salah satu tahap rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Daksa. Studi ini bertujuan mengetahui kondisi faktual pelaksanaan pembinaan lanjut yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Daksa. Metode penelitian adalah diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pembinaan lanjut dilaksanakan dalam bentuk pemantauan untuk melihat perkembangan fisik, mental dan sosial setelah eks klien kembali ke keluarganya. Pada kegiatan tersebut eks klien dan keluarganya diberikan motivasi, bimbingan penyusunan proposal, bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif, menghubungkan kebutuhan eks klien dengan sistem sumber. Hasil dari pembinaan lanjut tersebut dirasakan manfaatnya bagi eks klien maupun keluarganya. Namun demikian masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tindak lanjut, sehingga ke depan akan lebih optimal lagi dalam mewujudkan eks klien yang mandiri dan produktif.

Kata kunci: *disabilitas tubuh, panti sosial, pembinaan lanjut*

PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat atau difabel. Pada umumnya masyarakat lebih mudah

menggunakan istilah penyandang cacat. Disabilitas merupakan istilah yang diberikan kepada penyandang cacat sesuai dengan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Ratifikasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur dan mengupayakan penyandang disabilitas memperoleh persamaan hak-hak dasar untuk hidup bermasyarakat dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai bagian dari masyarakat.

Disabilitas merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang cukup kompleks karena berbagai masalah yang dialaminya. Sebagian masyarakat menganggap keberadaan disabilitas sebagai sesuatu hal yang merepotkan, aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan mereka dari pergaulan masyarakat. Ada pula yang menganggap mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Penyandang Disabilitas Tubuh sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui program pembangunan kesejahteraan sosial, diharapkan tidak seorangpun penyandang disabilitas tubuh sebagai warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pergeseran paradigma pelayanan sosial dari bentuk amal (*charity*) kepada upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

tubuh (*right based*), menuntut adanya upaya-upaya kearah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tubuh. Dengan demikian kesamaan kesempatan bagi seluruh penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas tubuh pada seluruh aspek kehidupan harus diupayakan dan diwujudkan.

Berdasarkan data Pusdatin Kesos (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial, penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2009 berjumlah 2.126.785 Jiwa, sebanyak 33,75 persen merupakan penyandang disabilitas tubuh. Di provinsi Sumatera Selatan terdapat 56.466 jiwa, sedangkan di provinsi Sulawesi Selatan terdapat 82.170 jiwa (Pusdatin Kesos Depsos RI, 2011). Penyandang disabilitas ini tersebar diberbagai pelosok kota dan desa yang belum semuanya terjangkau oleh program pelayanan kesejahteraan sosial.

Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (sekarang penyandang disabilitas) untuk mempersiapkan mereka agar memiliki berbagai keterampilan dan kesiapan mental, fisik, sosial yang dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya secara wajar sebagai warga Negara dan sebagai anggota masyarakat. Pelayanan dan rehabilitasi sosial ini memadukan unsur-unsur pemulihan, pembinaan dan pengembangan secara tuntas melalui pelayanan akomodasi, bimbingan dan pelatihan, kesehatan dan terapi penunjang lainnya sehingga penyandang disabilitas tubuh dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. PSBD yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang secara fungsional dibina oleh

Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat.

Proses rehabilitasi sosial di Panti Sosial dilaksanakan berdasarkan profesi pekerjaan sosial. Menurut Siporin (1975) yang dikutip oleh Fahrudin (2002) ada lima tahap pelayanan sosial, yaitu: 1) *engagement, intake and contract*; 2) assesment; 3) perencanaan; 4) intervensi; 5) evaluasi dan terminasi. Sedangkan tahapan (proses) pelaksanaan Rehabilitasi sosial Orang Dengan Kecacatan Tubuh Dalam Panti sesuai pedoman (2010) meliputi: 1) pendekatan awal; 2) penerimaan; 3) penelaahan daan pengungkapan masalah; 4) Rencana penempatan dalam program; 5) bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan; 6) resosialisasi; dan 7) pembinaan lanjut.

Pembinaan lanjut merupakan tahapan akhir dari proses rehabilitasi sosial atau pemulihan, yang ditujukan agar eks klien dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Pembinaan lanjut (*aftercare*) dilaksanakan setelah proses rehabilitasi sosial dalam panti sosial dan terminasi. Pembinaan lanjut merupakan interpretasi dari prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang diberikan kepada eks klien. Pembinaan lanjut dilaksanakan melalui kunjungan rumah atau kunjungan ke tempat kerja guna memantau perkembangan eks klien, sekaligus membantu mereka agar kembali beraktivitas di masyarakat, bisa memanfaatkan keterampilannya yang diperoleh dari panti, dan berintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan lanjut ini diperlukan karena dikawatirkan mereka akan mengalami masalah bahkan sangat mundur kembali setelah kembali ke masyarakat.

Sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut penting dilakukan. Hal ini didasarkan pada realitas sosial, bahwa penyandang disabilitas pada umumnya

mengalami gangguan fungsi tubuh yang berpengaruh pada mental psikologis mereka. Hal ini mengakibatkan proses penyesuaian diri penyandang disabilitas di masyarakat masih mengalami hambatan. Sampai saat ini informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut ini belum tersedia secara memadai, sehingga diperlukan penelitian evaluasi yang memfokuskan pada tindak lanjut bagi eks klien disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah eks klien PSBD, keluarganya serta petugas panti sosial. Data dan informasi serta keterangan yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskripsi menggambarkan efektivitas tindak lanjut pasca rehabilitasi sosial di PSBD.

PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DAN PERMASALAHANNYA

1. Penyandang Disabilitas Tubuh

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 masih menggunakan penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Jenis-jenis kecacatan ini terdiri dari tiga besar, yaitu cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental (pasal 1 ayat 1). Cacat fisik terdiri dari kecacatan tubuh, netra dan rungu wicara. Masing-masing jenis kecacatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Demikian juga dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai hal dalam kehidupannya. (Departemen Sosial RI. 2009 Pedoman advokasi sosial penyandang cacat. Jakarta :

direktorat pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat).

Penyandang disabilitas tubuh adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara seleyaknya. Disabilitas tubuh juga disebut *orthopedic* dan *muskuloskeletal* yang berarti disabilitas yang ada hubungannya dengan tulang, sendi dan otot. Disabilitas ortopedi adalah sakit jenis disabilitas, dimana salah satu atau lebih anggota tubuh bagian tulang, persendian mengalami kelainan (abnormal) sehingga timbul rintangan dalam melakukan fungsi gerak (motorik). Terdapat 3 jenis derajat penyandang disabilitas tubuh yakni: 1) Penyandang disabilitas Tubuh Ringan; yakni penyandang disabilitas dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari (ADL) nya tidak memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk dalam golongan ini adalah amputasi tangan atau kaki ringan salah satu, *cerebral palsy* ringan, layu salah satu kakai, tangan/ kaki bengkok dan sebagainya. 2) Penyandang disabilitas tubuh Sedang; yaitu penyandang disabilitas tubuh, dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari (ADL) nya harus dilatih terlebih dahulu, hingga dapat dilakukan sendiri tanpa pertolongan. Termasuk golongan ini adalah *Cerebral palsy* sedang, amputasi dua tangan atas siku, *muscle dystrophy* sedang, *scoliosis* dan sebagainya. (3) Penyandang disabilitas Tubuh Berat; yaitu penyandang disabilitas tubuh dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari (ADL) nya selalu memerlukan pertolongan orang lain. Termasuk golongan ini antara lain: amputasi dua kaki atas lutut dan dua tangan atas siku, *cerebral palsy* berat, layuh dua kaki dan dua tangan, paraplegia berat dan sebagainya.

2. Permasalahan Penyandang Disabilitas Tubuh

Secara intern permasalahan penyandang disabilitas tubuh adalah menyangkut jasmani, kejiwaan, pendidikan, ekonomi dan penampilan peranan sosial. Menyangkut permasalahan jasmani disabilitas tubuh yang diderita seseorang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari (*activity daily living*). Menyangkut kejiwaan, dapat mengganggu kejiwaan/mental seseorang, sehingga seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimistis, labil, sulit untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Keadaan seperti ini sangat merugikan, khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara manusia. Terkait permasalahan pendidikan, sering menimbulkan kesulitan khususnya pada anak umur sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah, kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah, maupun fasilitas umum lainnya. Terkait permasalahan ekonomi, pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Tingkat produktivitas yang rendah karena kelemahan jasmaniah maupun rohaniah hingga tidak memiliki keterampilan kerja (produksi). Sedangkan permasalahan terkait dengan penampilan peranan sosial, antara lain ketidakmampuan hubungan antar perorangan (*interpersonal relationship*), ketidakmapuan di dalam mengambil peranan di dalam kegiatan sosial/kelompok (partisipasi sosial), kecanggungan hubungan

antar manusia di masyarakat (*human relation*), ketidakmampuan di dalam mengambil peranan/di dalam kegiatan sosial/kelompok dan ketidakmampuan di dalam saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu kelompok sosial (interaksi sosial).

Terkait dengan permasalahan eksternal, penyandang disabilitas tubuh mengalami masalah keluarga, masyarakat, kelompok bermain dan pelayanan umum. Banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas tubuh merasa malu. Akibatnya mereka tidak dimasukkan sekolah, tidak boleh bergaul dan bermain dengan teman sebaya, kurang mendapatkan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh anak-anak pada umumnya, sehingga anak tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya, dan menjadi beban keluarganya. Masyarakat yang memiliki warga penyandang disabilitas tubuh akan turut terganggu kehidupannya, selama penyandang disabilitas tubuh tersebut belum dapat berdiri sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Dipandang dari segi ekonomi, sejak seseorang terutama yang telah dewasa menjadi penyandang disabilitas tubuh, masyarakat mengalami kerugian ganda, yaitu kehilangan anggota yang produktif dan bertambah anggota yang konsumtif, yang berarti menambah beban berat bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha-usaha rehabilitasi yang dapat merubah penyandang disabilitas tubuh dari kondisi konsumtif menjadi produktif. Disamping itu masih ada sikap dan anggapan sebagian anggota masyarakat yang kurang begitu menguntungkan bagi penyandang disabilitas tubuh, yang antara lain dapat digambarkan: 1) Masih adanya sikap yang ragu-ragu terhadap kemampuan (potensi) penyandang disabilitas tubuh; 2) sikap masa bodoh di sementara lapisan masyarakat

terhadap permasalahan penyandang disabilitas tubuh; 3) Belum meluasnya partisipasi masyarakat di dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas tubuh; 4) masih lemahnya sementara organisasi sosial yang bergerak di bidang kecacatan di dalam melaksanakan operasinya; 5) masih ada anggapan masyarakat bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas tubuh kurang potensial dibanding tenaga kerja tidak cacat; 6) pengguna jasa tenaga kerja penyandang disabilitas tubuh umumnya belum menyediakan kemudahan/sarana bantu yang diperlukan; 7) Program pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menjangkau seluruh populasi penyandang disabilitas tubuh; dan 8) masih sangat terbatasnya aksesibilitas bagi kemandirian dalam bekerja.

Penyandang disabilitas tubuh juga mengalami kesulitan dalam menemukan kelompok bermain. Mereka membentuk kelompok khusus yang cenderung menutup diri dan antar kelompok berkompetisi secara negatif. Sedangkan terkait dengan pelayanan umum seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tubuh.

REHABILITASI SOSIAL BAGI DISABILITAS

Pembinaan lanjut dalam praktik pekerjaan sosial cukup penting dalam pencapaian keberhasilan pelayanan, dan merupakan bagian dari manajemen kasus. Menurut Maguire dan Lambert (2002), manajemen kasus digunakan untuk mengelola, mengkoordinasi, dan memandu klien melalui serangkaian langkah-langkah tertentu di lapangan. Langkah tersebut termasuk antara lain asesmen

awal yang mendefinisikan masalah dan kekuatan, perencanaan, penghubungan dan pengkoordinasian, pemantauan dan perubahan yang mendukung, dan pada akhirnya meringkas serta menyelesaikan melalui terminasi dan dilanjut dengan tahap pembinaan lanjut.

Pembinaan lanjut tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam memandu aktivitas praktik pekerjaan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Sheafor dan Horejsi (2003), di antaranya:

1. Seorang pekerja sosial harus dapat memaksimalkan pemberdayaan kliennya
2. Seorang pekerja sosial harus terus menerus melakukan evaluasi terhadap kemajuan dari perubahan yang dicapai klien
3. Seorang pekerja sosial harus bertanggungjawab kepada lembaga, masyarakat dan profesi pekerjaan sosial.

Menurut Woodside dan Mc. Clam (2003), Keberlanjutan pelayanan memiliki dua pengertian:

1. Keberlanjutan berarti bahwa pelayanan yang diberikan pada klien tidak terputus dari tahap awal sampai terminasi dan keberlanjutannya.
2. Keberlanjutan pelayanan berarti penyediaan layanan secara komprehensif. Di dalamnya termasuk intervensi dengan dukungan dari lingkungan, memelihara hubungan dengan keluarga klien dan pihak-pihak lain dan jejaring sosial yang menghubungkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada.

Berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial, maka bimbingan lanjut dianggap perlu untuk dilakukan. Adapun tahapan dari bimbingan lanjut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan penyuluhan sosial.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan pendampingan secara individual.
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan pihak terkait.
5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan sistem sumber yang tersedia.
6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan memberikan bantuan pengembangan usaha.
7. Memantau perkembangan eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
8. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
9. Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap pekerja sosial di bawahnya.

Prinsip pokok dalam kegiatan pembinaan lanjut adalah adalah (1) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam upaya memberikan dukungan eks klien secara wajar kepada eks klien; (2) melibatkan eks klien dalam proses pemberdayaan dalam upaya mencapai kemandirian; dan (3) kerjasama panti sosial sebagai penyelenggara pembinaan lanjut dengan sumber yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan klien.

Meskipun pembinaan lanjut merupakan bagian proses rehabilitasi sosial, namun ditemukan sejumlah kendala, antara lain:

1. Pembinaan lanjut dipahami hanya sekedar kegiatan monitoring, yang dilakukan dengan mengunjungi eks klien baik ke keluarganya maupun ke tempat kerja, dilakukan melalui pengisian form.
2. Sejumlah masalah klien yang ditemukan dari kunjungan monitoring belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti.
3. Mobilitas eks klien panti sosial cukup tinggi, tempat tinggal eks klien sering berpindah-pindah hingga ke luar daerah sehingga menyulitkan petugas panti sosial dalam melakukan pembinaan lanjut.
4. Jangkauan pelayanan panti sosial yang cukup luas, tidak sebanding dengan kondisi SDM dan anggaran yang ada.

Adapun tahapan dari bimbingan lanjut yang dilakukan oleh pekerja sosial PSBD sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan penyuluhan sosial.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan pendampingan secara individual.
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan pihak terkait.
5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

dengan menggali dan mengaitkan dengan sistem sumber yang tersedia.

6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan memberikan bantuan pengembangan usaha.
7. Memantau perkembangan eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
8. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
9. Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap pekerja sosial di bawahnya.

Pembinaan lanjut ini memiliki peran penting dalam usaha mengetahui perkembangan eks klien pasca rehabilitasi sosial. Pembinaan lanjut seharusnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bimbingan peningkatan kehidupan masyarakat dan berperan serta dalam pembangunan. Kegiatan ini diharapkan memantapkan integrasi eks klien penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan penyandang disabilitas tubuh tidak rendah diri, merasa aman dan tidak cepat menyerah. Hal ini diperlukan mengingat para penyandang disabilitas tubuh pada umumnya mempunyai sifat-sifat: rasa rendah diri, kurang percaya diri, mengisolir diri, kehidupan emosional yang labil, dorongan biologis yang cenderung menguat, kecenderungan hidup senasib, berperilaku agresif, ada perasaan tidak aman, cepat menyerah, apatis dan kekanak-kanakan.
2. Bimbingan pengembangan usaha kerja dan bimbingan pemantapan usaha kerja, meliputi:

- a. Bimbingan pengembangan usaha kerja, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi pekerja sosial panti terhadap eks klien. Petugas datang ke lokasi eks klien guna mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami eks klien, yang selanjutnya merupakan bahan evaluasi panti dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam usaha pengembangan kerja. Pengembangan usaha ini bisa diwujudkan dengan bantuan modal untuk pengembangan usaha atau menghubungkan dengan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan eks klien
- b. Bimbingan pemantapan usaha kerja, yang ditujukan kepada eks klien yang sudah bekerja atau membuka usaha sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan usaha/kerja secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga eks klien dapat lebih mengembangkan usahanya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kepada klien yang sudah bekerja baik membuka usaha sendiri atau bekerja pada orang lain agar bisa mengembangkan usahanya

PROFIL PANTI SOSIAL BINA DAKSA

Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Perkasa Palembang dan PSBD Wirajaya Makasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (sekarang Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan/RSODK). Tugas PSBD ini adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar

pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan (Pasal 2 Kepmensos Nomor 106/HUK/2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial, PSBD dipimpin oleh seorang kepala dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan kelompok jabatan fungsional serta koordinator Instalasi Produksi.

Sasaran PSBD adalah penyandang disabilitas fisik yakni seseorang yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Para penyandang disabilitas tubuh ini berusia 17-35 tahun (usia produktif), tidak mempunyai cacat ganda lainnya, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program rehabilitasi sosial, mampu didik dan mampu latih serta dapat membaca dan menulis.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial klien meliputi: pelayanan makan, sandang dan asrama, pemeliharaan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan penggunaan alat bantu, bimbingan mental, agama, sosial dan keterampilan.

Uraian tentang kondisi SDM, klien dan aktivitasnya di masing-masing PSBD dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PSBD Budi Perkasa Palembang

Tenaga PSBD Budi Perkasa berdasarkan data April 2012 berjumlah 75 orang yang meliputi 56 orang pegawai tetap (PNS) dan

19 orang tenaga honorer. PSBD Budi Perkasa memiliki 8 orang pekerja sosial, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S.Sos) lulusan STSIP Candradimuka (3 orang), S2 STSIP Candradimuka (1 orang), sedang kuiah di STSIP Candradimuka (1 orang) dan SLA (SLA, SMPS, SPLB sebanyak 2 orang. Semua pekerja sosial ini telah memperoleh sertifikasi sebagai pekerja sosial. Apabila dibandingkan dengan jumlah klien, setiap pekerja sosial melayani 15 klien.

Wilayah kerja PSBD Budi Perkasa Palembang meliputi provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Khusus di Provinsi Sumatera Selatan Wilayah kerja PSBD Budi Perkasa meliputi 14 kabupaten/kota. Daya tampung klien sebanyak 120 orang dan masa pelayanan 1 s.d. 2 tahun yang disesuaikan dengan kemampuan klien.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSBD meliputi: (1) Bimbingan mental meliputi bimbingan agama dan budi pekerti serta kedisiplinan diberikan oleh petugas yang berasal dari dalam maupun dari panti; (2) Bimbingan sosial oleh pekerja sosial fungsional diberikan secara individu maupun kelompok, meliputi dinamika kelompok, konseling individu, terapi individu melalui kelompok sesuai dengan permasalahan klien; (3) Bimbingan fisik meliputi: olah raga yang disesuaikan dengan kondisi fisik klien; fisiotherapy; bimbingan pemakaian alat bantu dan penggunaannya, seperti *Ergosykly* (sepeda statis) alat untuk melatih otot kaki dan *Rowing Machine* (alat untuk menguatkan tangan), dengan memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga yang dimiliki PSBD; (4) Bimbingan keterampilan meliputi: komputer, penjahitan, las, elektronika, kerajinan wanita, sablon, otomotif, pertanian terpadu, salon tata rias dan *service handphone*. Bimbingan ini

disesuaikan dengan bakat dan minat klien sesuai hasil asesmen, dan setiap klien wajib mengikuti salah satu jenis keterampilan. Waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan keterampilan ini berkisar antara 8 hingga 18 bulan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan klien. Bimbingan keterampilan ini diberikan oleh instruktur dari dalam dan luar panti. Pelatihan diberikan secara individual karena masuknya tidak sama dan kemampuan yang berbeda-beda dengan Sistem kelas. Kegiatan praktek lebih banyak dibandingkan dengan teori; (5) Bimbingan kewirausahaan, diberikan oleh pekerja sosial dan instruktur agar klien memiliki jiwa berusaha sehingga diharapkan dapat mengembangkannya setelah kembali ke masyarakat; (6) Biimbingan praktek belajar kerja/magang; (7) kegiatan tambahan (ekstrakurikuler) meliputi: latihan kesenian/music, tata boga (masak memasak) dan olah raga; (8) Resosialisasi, meliputi: bimbingan sosial kesiapan hidup bermasyarakat, bimbingan kesiapan peran serta keluarga dan masyarakat, bimbingan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif dan rujukan peningkatan keterampilan ke BBRVBD Cibinong. Rehabilitasi sosial ini diakhiri dengan penyaluran dan bimbingan Lanjut, dan terminasi yakni penghentian pelayanan bila klien dinyatakan layak untuk dihentikan pelayanan.

2. PSBD Wirajaya Makassar

PSBD Wirajaya memiliki 15 orang pekerja sosial fungsional, 3 orang di antaranya akan memasuki pensiun. Latar belakang pendidikan mereka bervariasi, 8 orang sarjana, 1 orang sarjana muda dan 3 orang SLA. Sedangkan dilihat dari jenjang jabatannya terdapat 5 orang pekerja sosial madya (IVa dan IVb), 4 orang pekerja sosial muda (IIIc dan IIId), 2 orang pekerja sosial penyelia (IIId), dan 1 orang pekerja sosial pelaksana lanjutan (IIIf). Dilihat dari

jenjang jabatannya terdapat kesenjangan dimana pekerja sosial madya dan muda lebih banyak dibanding dengan pekerja sosial pelaksana. Mereka terpaksa melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja sosial pelaksana, sehingga mengalami kesulitan saat membuat laporan. Sebagian besar pekerja sosial di PSBD juga diperbantukan di seksi PAS, seksi Rehabilitasi Sosial, Tata Usaha dan instruktur keterampilan.

PSBD Wirajaya mempunyai kapasitas tampung maksimum 210 orang dengan jaangkauan wilayah kawasan timur Indonesia meliputi: Sulawesi, Maluku, Irian Jaya (Papua), Nusa Tenggara Tenggara dan sebagian Kalimantan atau terdiri dari 15 provinsi, 28 kota dan 170 kabupaten.

Sebagaimana PSBD Budi Perkasa, pelayanan dan kegiatan rehabilitasi sosial PSBD Wirajaya meliputi: (1) Bimbingan dan pelayanan fisik; bimbingan pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan, Senam Kesegaran Jasmani, olah raga, pelayanan makan, sandang dan fasilitas tempat tinggal; (2) bimbingan penggunaan alat bantu; (3) bimbingan mental mencakup: bimbingan agama dan budi pekerti baik di kelas maupun di masjid panti, pelatihan ceramah/pidato, jamaah sholat di masjid bagi muslim, dan ceramah agama Kristen; (4) bimbingan sosial, diberikan dalam upaya memulihkan dan atau menumbuhkembangkan kemauan, kepercayaan diri dan kemampuan klien dalam penyesuaian diri (*personal adjustment*); dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya (*social adjustment*); meliputi bimbingan konsep diri dan sosialisasi, bimbingan konseling, bimbingan relasi sosial, dan bimbingan integrasi sosial; (5) bimbingan keterampilan kerja terdiri dari penjahitan pakaian pria dan wanita, percetakan/sablon, elektronika, automotif, fotografi, tata rias, meubelair (pertukangan kayu); (6) bimbingan baca tulis, diberikan

kepada klien yang belum lancar baca tulis yang dilakukan pada awal program sebelum memasuki bimbingan keterampilan; (7) praktek Belajar Kerja (PBK); dan (8) bimbingan kewirausahaan;

PELAKSNAAN PEMBINAAN LANJUT DI PSBD

1. Pemahaman Petugas tentang Pembinaan Lanjut

Pembinaan lanjut oleh sementara staf PSBD Wirajaya dipahami dengan sebutan bimbingan lanjut, yakni kegiatan kunjungan rumah atau kunjungan ke tempat kerja eks klien dalam rangka memonitor perkembangan mereka setelah kembali ke masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya untuk lebih memantapkan kemandirian eks klien terutama mereka yang karena berbagai sebab masih tetap memerlukan bimbingan peningkatan kemampuan pasca rehabilitasi sosial. PSBD Budi Perkasa juga memahaminya sebagai kegiatan monitoring yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan klien pasca rehabilitasi sosial. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan sekali tetapi bisa beberapa kali sesuai dengan permasalahan eks klien. Pelaksana Pembinaan Lanjut di kedua PSBD adalah Seksi Rehabilitasi Sosial yang dikordinasikan dengan Tata Usaha dan Seksi Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan pembinaan lanjut di PSBD Wirajaya melibatkan sebagian pekerja sosial fungsional, sementara PSBD Budi Perkasa selain pekerja sosial juga melibatkan instruktur atau seksi rehabilitasi sosial.

Tujuan pembinaan lanjut yang dipahami oleh kedua PSBD adalah (1) memonitor perkembangan eks klien pasca rehabilitasi sosial; (2) membantu permasalahan eks klien dalam usaha meningkatkan perannya dalam kehidupan di masyarakat; (3) mengupayakan agar masyarakat, dunia

usaha dan instansi sosial kabupaten/kota berperan dalam pembinaan eks klien; (4) meningkatkan kemandirian eks klien sesuai dengan kemampuannya. Tujuan ini bisa dicapai dengan mengunjungi dan memonitor perkembangan eks klien setelah kembali ke masyarakat.

Menurut kepala Kepala PSBD, Seksi PAS dan pekerja sosial PSBD Budi Perkasa, idealnya pembinaan lanjut dilakukan melalui 4 kali kunjungan. Kunjungan pertama ditujukan untuk melihat perkembangan klien pasca rehabilitasi sosial panti. Melalui kegiatan ini diharapkan teridentifikasinya permasalahan dan kebutuhan eks klien. Kunjungan kedua ditujukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan klien. Petugas menghubungkan antara kebutuhan eks klien dengan sistem sumber yang tersedia. Kunjungan ketiga dilakukan dalam upaya memberikan bantuan pengembangan usaha kepada eks klien. Instruktur berperan aktif dalam usaha membantu eks klien mengembangkan usahanya sesuai dengan keterampilan yang diperoleh dari panti. Kunjungan keempat yakni monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial. Jumlah kunjungan ini disesuaikan dengan kondisi eks klien, Bagi eks klien yang dipandang masih memerlukan pembinaan, idealnya pembinaan lanjut dilakukan sebanyak 4 kali untuk setiap eks klien

2. Pelaksanaan Pembinaan Lanjut

Secara umum pelaksanaan pembinaan lanjut di kedua PSBD ini mengacu pada pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Tubuh Dalam Panti yang diterbitkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (RSODK) Ditjen Resos Kementerian Sosial RI tahun 2010. Pedoman ini menjelaskan tentang tahap pembinaan lanjut yang meliputi:

(1) Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan berperan serta dalam pembangunan; (2) Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan; dan (3) bimbingan pemantapan/ peningkatan usaha.

Secara teknis PSBD Wirajaya juga menyusun Teknis Kegiatan Bimbingan Lanjut. Petunjuk teknis ini mengatur tentang sasaran, pelaksana, indikator keberhasilan dan tahap pelaksanaan yang meliputi: pembentukan panitia, penentuan daerah, pengajuan proposal, dana dan teknis pelaksanaan. Petunjuk teknis ini masih sederhana karena belum memuat pengertian tentang bimbingan lanjut, seksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan lanjut apakah seksi PAS atau Seksi Rehabilitasi sosial, siapa saja yang melaksanakan, apakah semua pejabat struktural dan fungsional terlibat, kegiatannya/tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana lapangan dan cara pelaksanaannya. Meskipun demikian petunjuk teknis ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman petugas dalam melaksanakan pembinaan lanjut.

Sedangkan di PSBD Budi Perkasa Palembang tidak secara khusus membuat pedoman sendiri, namun mengacu pada pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Tubuh Dalam Panti yang diterbitkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (RSODK).

Tujuan pembinaan lanjut adalah: 1) terjalannya komunikasi dan koordinasi PSBD dengan pemerintah daerah/Dinas Sosial; 2) mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat lingkungan masyarakat; 3) mengetahui kondisi obyektif klien pasca rehabilitasi sosial; dan 3) menggali sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha ekonomis produktif eks klien.

Penanggung jawab kegiatan pembinaan lanjut untuk kedua PSBD ini adalah Kepala seksi Rehabilitasi Sosial, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pekerja sosial fungsional, seksi rehabilitasi sosial dan instruktur. Pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, karena anggaran pembinaan lanjut di kedua PSBD ini sangat terbatas. Keterbatasan anggaran ini bisa dicermati di PSBD Wirajaya, yang dapat dilihat dari persentase anggaran untuk kegiatan proses rehabilitasi sosial di tahun 2011 dan 2012 sebesar + 33 persen dari total anggaran PSBD. Persentase anggaran untuk pembinaan lanjut hanya sebesar 0,04 persen (tahun 2011) dan 0,05 persen (tahun 2012) dari total anggaran proses rehabilitasi sosial. Anggaran pembinaan lanjut yang tidak sampai 1 persen mengakibatkan kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh 2-3 orang petugas dengan jangkauan wilayah terbatas, dan tidak sebanding dengan jangkauan wilayah kerja PSBD.

Tidak semua pekerja sosial dilibatkan dalam kegiatan ini, dan tidak semua eks klien terjangkau dalam pembinaan lanjut karena terbatasnya dana PSBD. Petugas dan sasaran lokasi diatur sedemikian rupa agar setiap tahun bimbingan lanjut dapat dilaksanakan dengan melibatkan pekerja sosial secara bergantian. Keterbatasan dana ini disikapi oleh PSBD dengan mempertimbangkan skala prioritas. Anak yang memerlukan bimbingan didasarkan atas evaluasi selama proses pembinaan di dalam panti dan informasi berbagai anak/keluarga/tokoh masyarakat setempat tentang kondisi/ perkembangan eks klien meskipun berasal dari pelosok-pelosok desa yang kadang sulit terjangkau oleh kendaraan umum. Pelaksanaan pembinaan lanjut selama 3 hari pulang pergi, dan setiap petugas diberikan transport, biaya penginapan dan uang harian.

Sasaran pembinaan lanjut adalah semua eks klien yang berada di wilayah tersebut tanpa dibatasi tahun berapa eks klien menyelesaikan proses rehabilitasi sosial di PSBD, dengan catatan lokasi tempat tinggal eks klien terjangkau dan belum terminasi. Petugas yang melaksanakan kegiatan ini bisa juga sekaligus melaksanakan pendekatan awal, dan terminasi. Hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan PSBD dalam mengatasi hambatan terkait dengan terbatasnya dana. upaya perkembangan eks klien ini, baik di PSBD Budi Perkasa maupun PSBD Wirajaya digunakan instrumen/form pembinaan lanjut yang diisi oleh petugas. Form ini berisi identitas eks klien, aktivitas klien setelah kembali ke keluarga, kegiatan ekonomi, pemanfaatan keterampilan dan *toolkit* dari panti, faktor-faktor yang mempengaruhi usahanya, rencana dan harapan di masa depan. Kunjungan dilakukan baik ke tempat usaha eks klien maupun ke keluarganya. Sasaran pembinaan lanjut adalah semua eks klien yang berada di wilayah yang dikunjungi, tidak dibatasi tahun kelulusan eks klien, yang penting eks klien belum terminasi

Pelaksanaan pembinaan lanjut di kedua PSBD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan

1) Pembentukan Panitia

Panitia pembinaan lanjut tim kerja yang terdiri dari unsur-unsur Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program dan Advokasi Sosial, Tata Usaha dan pejabat fungsional pekerja sosial. Tim kerja ini mengadakan pertemuan-pertemuan teknis persiapan dan pelaksanaan pembinaan lanjut membahas jadwal kegiatan, perlengkapan yang diperlukan, pelaksana pembinaan

lanjut, pembagian tugas dan teknik pelaksanaan.

2) Penentuan sasaran

Kegiatan ini diawali dengan identifikasi data eks klien dan penyebarannya yang dikembalikan ke keluarganya dalam 2-3 tahun terakhir, anggaran yang tersedia, lokasi dan jumlah petugas yang diperlukan. Data ini dikelompokkan dalam variabel jenis kelamin, jenis keterampilan yang diikuti, wilayah dan tahun keluar, sehingga akan diketahui wilayah mana saja yang paling banyak eks klien.

3) Penyusunan proposal/rencana kegiatan

Proposal/rencana kegiatan ini terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, jumlah petugas yang diperlukan, pejabat yang perlu dilibatkan, dana yang diperlukan dan jadwal kegiatan. Proposal ini diajukan ke kepala PSBD untuk mendapatkan persetujuan.

4) Pertemuan yang dihadiri oleh kepala seksi Rehabilitasi Sosial, kepala seksi Program dan Advokasi Sosial, tata Usaha dan Pekerja Sosial Fungsional ditentukan lokasi/wilayah yang menjadi sasaran pembinaan lanjut. Wilayah yang dikunjungi didasarkan atas pertimbangan kondisi eks klien yang dilihat dari perkembangan selama proses rehabilitasi sosial, dan pertimbangan anggaran yang tersedia

5) Menyiapkan perlengkapan administrasi, terdiri dari: (1) Surat Pemberitahuan ke Dinas Sosial; (2) SPPD dan Surat Tugas; (3) Penyampaian informasi kepada

Pihak Kepegawaian; (4) Blangko Format Bimbingan Lanjut; (5) peralatan tulis; (6) Tanda Pengenal; (7) Brosur PSBD; (8) Panduan Penerimaan Kelayan; (9) Handicam/camera ; (10) VCD.

b. Pelaksanaan

1) Pemberangkatan tim ke lokasi menggunakan kendaraan umum (pesawat, kapal laut atau kendaraan darat) atau kendaraan dinas PSBD apabila lokasi pembinaan lanjut terjangkau

2) Bertemu dengan Dinas sosial setempat untuk melapor, menyelesaikan administrasi dan sekaligus diharapkan dapat memberikan dukungan. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial ada yang memberikan dukungan dengan memberikan tenaga pendamping, namun tidak sedikit petugas PSBD harus mencari alamat eks klien tanpa pendamping Dinas Sosial.

3) Bertemu dengan klien.

Petugas mendatangi eks klien ke tempat kerjanya atau langsung ke rumahnya sesuai dengan data yang ada di PSBD. Tidak jarang petugas mengalami berbagai kendala seperti lokasi tempat tinggal eks klien terpencil yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum, klien sudah pindah/kontrak ke daerah lain, dan alamat yang tidak sesuai dengan data yang ada di PSBD. Meskipun demikian petugas berusaha menemukan eks klien dengan menghubungi camat, kepala desa, Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Upaya menggali berbagai Informasi tentang perkembangan eks klien

ini dilakukan melalui wawancara, diskusi, konsultasi dan pengamatan kondisi eks klien dan lingkungannya dan perkembangan saat ini sesuai dengan form isian pembinaan lanjut

- 4) Bertemu dengan tokoh masyarakat sekitar tempat tinggal eks klien untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan eks klien pasca rehabilitasi sosial di PSBD, sekaligus mendiskusikan permasalahan yang dihadapi eks klien
- 5) Bila dirasakan cukup petugas bisa langsung kembali ke PSBD atau bertemu dengan Dinas Sosial setempat untuk mendiskusikan berbagai masalah eks klien. Terbatasnya waktu dan anggaran yang diberikan tidak jarang petugas langsung kembali ke PSBD, dan laporan ke Dinas Sosial melakukan melalui telpun.

c. Pelaporan

Laporan hasil pembinaan lanjut dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dan merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya, menjadi dokumen PSBD, dan bahan evaluasi pembinaan lanjut.

KONDISI PENYANDANG DISABILITAS

Pembahasan ini akan difokuskan pada (1) jumlah eks klien yang sudah menjalani pembinaan lanjut dan kondisi mereka pada umumnya berdasarkan informasi dari pekerja sosial dan petugas PSBD lainnya; (2) profil klien berdasarkan studi kasus terhadap 10 eks klien dan faktor-faktor yang berpengaruh.

1. Jumlah eks Klien yang Sudah Menjalani Pembinaan Lanjut

Salah satu ciri penyandang disabilitas adalah merasa rendah diri karena kecacatannya, sehingga jarang bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Secara emosi, lebih sensitif perasaannya, mudah tersinggung dan sering meratapi kekurangannya. Selama proses rehabilitasi sosial dalam panti memungkinkan para penyandang disabilitas banyak mengalami perubahan, namun tidak tertutup kemungkinan setelah kembali ke masyarakat mengalami masalah, sehingga pembinaan lanjut diperlukan.

PSBD cukup berhasil dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial dalam panti, karena dukungan sarana prasarana, SDM dan anggaran APBN. Masa rehabilitasi sosial klien dalam panti ini berlangsung antara 1 – 2 tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam menyerap keterampilan yang diberikan PSBD. Namun demikian pasca rehabilitasi sosial, keberhasilan klien sangat tergantung dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat

Pembinaan lanjut merupakan salah satu proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBD. Sesuai dengan anggaran yang ada PSBD hanya mampu melaksanakan pembinaan lanjut dengan sasaran eks klien dan lokasi yang terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya jangkauan wilayah kerja PSBD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Pelaksanaan Pembinaan Lanjut di PSBD 2010-2011

Tahun	PSBD Budi Perkasa (orang)	PSBD Wirajaya (orang)
2010	66	35
2011	37	26

Sumber: PSBD Budi Perkasa dan PSBD Wirajaya

Dibandingkan dengan eks klien yang dikembalikan kepada keluarganya, sesuai informasi yang diperoleh melalui FGD, pembinaan lanjut hanya bisa dilaksanakan antara 30 persen - 35 persen dari jumlah eks klien yang telah lulus/dikembalikan ke keluarganya. Hasil pembinaan lanjut yang dilaksanakan oleh PSBD Budi Perkasa dan PSBD Wirajaya yang dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas lain yang ditunjuk oleh pimpinan panti, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pada umumnya eks klien telah kembali kekeluarganya dan mampu berperan dalam kehidupan masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Para penyandang disabilitas tubuh ini sudah tidak terlihat merasa rendah diri, merasa aman dan tidak cepat menyerah. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang pada umumnya mempunyai sifat-sifat: rasa rendah diri, kurang percaya diri, mengisolir diri, kehidupan emosional yang labil
- b. Mayoritas tingkat pendidikan formal eks klien hanya SD bahkan ada yang tidak tamat SD. Bimbingan fisik, penggunaan alat bantu, mental, agama, sosial, dan keterampilan dalam upaya memberikan bekal usaha ekonomis produktif bisa dimanfaatkan setelah kembali ke keluarga/masyarakat, baik usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. Namun ada pula eks klien yang belum bisa memanfaatkan keterampilannya yang diperoleh dari panti, karena kondisi ekonomi keluarga yang berpengaruh pada eksistensi klien di tengah-tengah keluarga/masyarakat.
- c. Sebagian keluarga juga memberikan dukungan kepada eks klien terutama keluarga yang mampu dengan menyediakan fasilitas tempat usaha untuk

reparasi HP, warung, rental computer, reparasi sepeda motor dan menjahit.

- d. Ada perusahaan yang memberikan kesempatan eks klien untuk bekerja di perusahaannya, seperti konveksi, bengkel sepeda motor, *service* elektronika. Sementara Pertamina di Sumatera Selatan juga memberikan bantuan mesin jahit, setelah salah seorang eks klien mengajukan proposal ke perusahaan tersebut.
- e. Sebagian besar Instansi sosial provinsi/kabupaten belum berperan dalam pemberdayaan eks klien pasca rehabilitasi sosial di PSBD.

2. Kondisi eks klien

Berdasarkan studi kasus terhadap 10 eks klien PSBD Budi Perkasa Palembang dan PSBD Wirajaya Makassar diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Perubahan sikap mental eks klien
Perubahan sikap mental eks klien ditunjukkan oleh eks klien penyandang disabilitas tubuh yang mempunyai semangat tinggi, tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Semangat pantang menyerah ini dibuktikan saat salah seorang eks klien ini mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan peralatan/perlengkapan jahit ke salah satu instansi setempat, namun setelah dirasakan lambat, ia mengajukan permohonan bantuan langsung ke Walikota yang akhirnya memberikan bantuan mesin *over deg* senilai Rp. 5.000.000,- Demikian juga seorang penyandang disabilitas yang membuka usaha dengan dukungan orang tuanya. Sementara kasus 6 eks klien wanita asal Sulsel, NTB dan NTT mengikuti keterampilan menjahit selama 2 tahun di PSBD Wirajaya, yang sempat pulang

ke daerah asalnya, mereka kembali ke Makassar dan bekerja di pengusaha Modis Makassar. Selain menerima upah, fasilitas tempat tinggal dan makan, mereka diajarkan keterampilan membordir dan membuat payet (motek-motek). Perusahaan juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya sehingga kelak bisa membuka usaha sendiri. Saat ini mereka merasa sudah ada perubahan, yang sebelumnya merasa rendah diri, malu, kurang percaya diri, tidak mau bergaul, menyendiri dan tidak pernah keluar rumah, namun saat ini mereka lebih percaya diri. Dalam hal aktivitas di masyarakat, ada seorang klien yang duduk sebagai pengurus wanita penyandang disabilitas tubuh di daerahnya, dan aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas tubuh khususnya wanita di wilayahnya.

b. Keberfungsian sosial eks klien

Kegiatan rehabilitasi sosial PSBD berpengaruh positif terhadap eksistensi penyandang disabilitas tubuh di masyarakat. Mereka lebih mandiri yang ditunjukkan kemampuan penyandang disabilitas tubuh dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka berusaha untuk tidak tergantung pada orang lain, dengan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh dari PSBD untuk bekerja, baik membuka usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. Membuka usaha rental computer, penjualan pulsa dan asesoris HP yang merangkap penjualan barang kelontong, reparasi HP, dan reparasi elektronik merupakan kegiatan para penyandang disabilitas tubuh pasca rehabilitasi sosial di PSBD. Sedangkan penyandang disabilitas tubuh yang bekerja pada orang lain di antaranya sebagai teknisi

sepeda motor, salon dan penjahitan. Mereka berharap suatu hari nanti bila sudah memperoleh pengalaman dan tabungan yang cukup akan membuka usaha sendiri di daerah asalnya. Hal ini menunjukkan para penyandang disabilitas tubuh mempunyai keinginan untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.

Meskipun banyak eks klien penyandang disabilitas tubuh yang cukup berhasil dan terdapat perubahan sikap mental dan keberfungsian mereka, namun dari studi ini juga terlihat masih ada yang belum berhasil. Kasus seorang wanita yang mengikuti keterampilan menjahit di PSBD, yang hanya sampai kelas IV SD dan orang tuanya bekerja sebagai buruh. Pasca rehabilitasi sosial sifat pemalu dan rendah diri masih cukup nampak, yang mendapat bantuan pinjaman mesin jahit dari keluarganya untuk menerima jahitan dari warga sekitar. Usaha ini nampak tidak berkembang karena disamping kondisi lingkungan, juga kemampuan klien dalam bidang penjahitan masih terbatas. Warga masih menganggap hanya mampu menambal dan memperbaiki pakaian yang rusak. Kasus lainnya dialami oleh penyandang disabilitas tubuh laki-laki yang kedua kakinya polio melitis, sehingga harus menggunakan dua tongkat saat berjalan. Selama mengikuti kegiatan di PSBD tidak mempunyai prestasi menonjol. Latar belakang pendidikan yang hanya tamat SMP dan kehidupan sehari-harinya yang lebih banyak mengamen di jalan sebelum masuk panti. Saat ini ia membuka reparasi elektronika dengan memanfaatkan rumah milik kakaknya sebagai bengkel kerja. Usaha ini belum sepenuhnya berhasil karena sarana dan prasarana kerja masih terbatas dan mayoritas konsumen berasal dari golongan ekonomi lemah.

Pada dasarnya pendidikan/pelatihan keterampilan dimaksudkan guna mempersiapkan tenaga kerja sebelum memasuki lapangan pekerjaan, agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan syarat yang dikehendaki oleh suatu jenis pekerjaan. Menurut Kartini Kartono, 1984 (Menyiapkan dan Memandu Karier, 1984, Jakarta: Pusat Bimbingan UNIKA), faktor yang diduga dapat mempengaruhi kesiapan kerja adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: kecerdasan (kemampuan akademis), keterampilan dan kecakapan, bakat dan minat, motivasi, kemampuan dan kepribadian, cita-cita dan tujuan dalam bekerja. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan tempat bekerja.

Selain itu faktor minat juga mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja. Kemampuan akademis, kematangan, pengalaman, keadaan mental dan emosi serta minat kerja ini diduga dapat mempengaruhi seseorang memasuki dunia kerja.

Berdasarkan studi terhadap 10 eks klien penyandang disabilitas tubuh dari kedua PSBD ini, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap mental dan keberfungsiaan mereka berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri eks klien penyandang disabilitas tubuh, antara lain:

1) Tingkat pendidikan formal penyandang disabilitas tubuh

Studi ini menunjukkan bahwa pola pikir dan sikap mental eks klien yang berpendidikan SLTA cenderung lebih baik dibanding dengan mereka yang hanya berpendidikan SD dan SLTP. Hal ini didukung oleh informasi dari

petugas PSBD yang menyatakan tingkat pendidikan eks klien PSBD sebagian besar adalah SD dan bahkan ada yang tidak sekolah sehingga berpengaruh pada lamanya waktu proses rehabilitasi sosial di PSBD. Diperlukan materi tambahan baca tulis dahulu sebelum materi keterampilan, sehingga proses rehabilitasi sosial mereka lebih lama. Mereka yang berpendidikan SLTA juga lebih eksis di masyarakat dibanding dengan mereka yang berpendidikan SD dan SLTA.

2) Keberhasilan mereka didukung oleh bakat dan minat serta motivasi yang tinggi untuk maju. Disabilitas tubuh bukan merupakan halangan untuk maju, mereka berusaha mendayagunakan hasil dari rehabilitasi sosial yang diperoleh selama mengikuti kegiatan di PSBD.

Eks klien yang memiliki karakteristik rendah diri, latar belakang pendidikan rendah, dan penyandang disabilitas tubuh berat berpengaruh pada keberfungsiaan klien di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada eksistensi eks klien penyandang disabilitas tubuh berdasarkan studi ini antara lain:

1) Dukungan orang tua

Studi ini juga menunjukkan bahwa dukungan orang tua berpengaruh pada eksistensi klien di masyarakat. Bentuk dukungan ini berupa pemberian motivasi dan semangat dari keluarga dan fasilitas untuk kegiatan usaha ekonomi. Eks klien yang memperoleh dukungan moral dan fasilitas usaha berasal dari keluarga ekonomi yang cukup baik, sebaliknya mereka yang tidak memperoleh dukungan disebabkan oleh terbatasnya kemampuan sosial ekonomi keluarga

sehingga berpengaruh pada eksistensi eks klien di masyarakat.

2) Lingkungan masyarakat

Meskipun secara fisik eks klien memiliki tubuh yang kurang sempurna, namun dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat mampu merubah eks klien menjadi lebih baik dibanding sebelum masuk panti. Sebaliknya lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung juga mengakibatkan eks klien sulit berkembang. Studi ini menunjukkan bahwa bantuan orang tua dan banyaknya masyarakat yang datang untuk reparasi HP, salon kecantikan, penjahitan, computer membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap usaha ekonomi klien. Pengusaha yang memberikan kesempatan eks klien juga merupakan kepercayaan masyarakat akan kemampuan eks klien. Sebaliknya mereka yang belum berhasil disebabkan kondisi lingkungan yang merupakan hambatan klien untuk mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN DAN EKOMENDASI

Pembinaan lanjut merupakan salah satu proses rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) yang dilaksanakan setelah eks klien kembali ke keluarganya. Baik di PSBD Budi Perkasa Palembang maupun di PSBD Wirajaya Makasar, kegiatan pembinaan lanjut lebih mencerminkan monitoring untuk melihat perkembangan fisik, mental dan sosial eks klien setelah kembali ke keluarga. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan eks klien ke tempat usahanya atau ke keluarganya. Bentuk kegiatannya meliputi: pengisian form perkembangan eks klien pasca rehabilitasi sosial, motivasi kepada eks klien dan keluarganya, bimbingan penyusunan proposal

pengajuan bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif, monitor lanjutan bagi eks klien yaang menerima bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif, menghubungkan antara kebutuhan eks klien dengan sistem sumber yang relevan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pekerja sosial, seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS), Seksi Rehabilitasi Sosial PSBD.

Proses pembinaan lanjut diawali dengan persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan laporan. Tahap persiapan meliputi identifikasi dan pengelompokan data eks klien sesuai wilayah tempat tinggalnya, penyusunan proposal, pertemuan tim pembinaan lanjut, menyiapkan form dan kelengkapan administrasi. Tahap pelaksanaan meliputi pemberangkatan tim ke lokasi, koordinasi dengan instansi sosial setempat, pertemuan dengan eks klien dan keluarganya dalam rangka memperoleh informasi perkembangan fisik, mental dan sosial, bimbingan motivasi sesuai permasalahan eks klien, bertemu dengan tokoh masyarakat setempat untuk membahas permasalahan yang dihadapi eks klien dan kembali ke PSBD. Kegiatan ini diakhiri dengan laporan hasil pembinaan lanjut.

Pada aspek mental sosial, secara umum kondisi eks klien PSBD berdasarkan studi kasus eks klien menunjukkan tumbuhnya kepercayaan diri, yang sebelumnya merasa rendah diri, malu, kurang percaya diri, tidak mau bergaul, menyendiri dan tidak pernah keluar rumah klien. Secara kualitatif kondisi ini menunjukkan ada pengaruh positif proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBD terhadap keberfungsian klien di masyarakat. Faktor internal terkait dengan kondisi eks klien seperti jenis kecacatan dan latar belakang pendidikan formal, dan faktor eksternal terkait dengan kondisi keluarga dan masyarakat menentukan keberhasilan eks klien, dukungan keluarga menjadikan eks klien lebih

percaya diri dalam beraktivitas baik dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi sesuai keterampilan yang dimiliki maupun aktivitas di masyarakat. Sebaliknya kurang berhasilnya eks klien dalam studi kasus ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri mereka, kondisi sosial ekonomi keluarga dan dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan mengingat pentingnya pembinaan lanjut sebagai proses rehabilitasi sosial di PSBD, direkomendasikan:

1. Pembinaan lanjut diakomodasi dalam proses perencanaan dan anggaran yang memadai.
2. Sasaran pembinaan lanjut adalah semua eks klien, sehingga dapat diketahui perkembangannya, dan sekaligus melakukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam upaya mengatasi hambatan tersebut.
3. Pelaksanaan pembinaan lanjut dilakukan sesuai perkembangan eks klien penyandang disabilitas, melalui tahap-tahap:
 - a. Kunjungan pertama, ditujukan untuk monitoring atau memantau perkembangan eks klien setelah kembali ke keluarganya, baik fisik, mental, sosial maupun usaha ekonominya, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan eks klien. Bila ditemukan perlu pengembangan usaha, eks klien menyusun proposal (dengan bimbingan pekerja sosial) untuk pengembangan usahanya. Hasil monitoring ini perlu dibuat laporan untuk bahan evaluasi dan diskusi dengan sesama pekerja sosial PSBD dan menentukan langkah selanjutnya
 - b. Kunjungan kedua, menindaklanjuti temuan hasil monitoring yang dilakukan tahap pertama. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan pengembangan usaha sesuai kebutuhan, menghubungi tokoh masyarakat dan

instansi sosial untuk ikut memantau perkembangan klien.

- c. Kunjungan ketiga, memantau perkembangan eks klien setelah memperoleh bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif, memberikan motivasi baik kepada eks klien maupun keluarganya.
 - d. Kunjungan keempat, bila dalam kunjungan keempat eks klien dinilai sudah mandiri maka dapat dilakukan terminasi
4. Mengingat luasnya jangkauan wilayah kerja dan keterbatasan PSBD, keterlibatan instansi sosial kabupaten/kota sangat diperlukan dalam :
 - a. Memantau perkembangan eks klien yang berada di wilayahnya
 - b. Memberikan bantuan pengembangan usaha eks klien
 - c. Koordinasi dengan PSBD dalam upaya mengatasi permasalahan eks klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2010). *Penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Tunagrahita Melalui PSBG Grahita: Studi Kasus di PSBG Ciungwanara Bogor*. Jakarta: P3KS Press.
- Astuti, M. (2010). *Penelitian Pola Asuh Dalam Keluarga*. Jakarta: P3KS Press.
- Djuwita, E. (2003). *Memilih dan Mencari kerja Sesuai Dengan Bakat dan Kepribadian*. Jakarta: Kawan Pustaka
- Fahrudin, A. (2002). *Kerja sosial dan isu-isu terpilih*. Sabah: Universiti Malaysia.
- Fahrudin, A. (2011). *Kesejahteraan Sosial. Sebuah Pengantar*. Jakarta: P3KS Press.
- Hikmat, H. *Membangun Kebijakan Sosial, Perumusan, Mekanisme dan Faktor yang Mempengaruhi*. Makalah yang disampaikan pada acara penyusunan naskah kebijakan

- tanggal 30 Oktober 2012 di Hotel Cipta 2 Jakarta.
- , Harry Hikmat. Analisis Kebijakan Pengembangan Panti Sosial dalam <http://isearch.babylon.com/>
- Hepworth, D. R. (2001). *Direct sosial work practice: Theory and Skill (6th ed)*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.
- Kartono, K. (1984). *Menyiapkan dan Memandu Karier*. Jakarta: Pusat Bimbingan UNIKA
- Kementerian Sosial. (2004). Keputusan Menteri Sosial Nomor: 50/HUK/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- (2002). *Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusdatin Kessos.
- (2009). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (2009). *Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014*. Jakarta: Dirjen Yanrehsos Departemen Sosial.
- (2011). *Pedoman Penyusunan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Sosial.
- (2004). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial – Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Lambert, M. D. (2002). *Clinical Social Work Beyond Generalist Practice with Individuals, Groups dan Families*. London: Brooks/Cole.
- Martin, F. (2011). *Improving Child Protection Responses in Indonesia: Learning from the Protection Homes for Children (RPSAs)*. Jakarta: Save The Children.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyono. (2009, Mei 13). <http://> Penelitian-evaluasi-kebijakan. Retrieved Maret 2012, 2012, from Mulyono. 2009. Penelitian Evaluasi Kebijakan.
- Mu'tadi, Z. (2002). *Kemandirian Sebagai Kebutuhan Psikologis Remaja*, dalam <http://daffonmuslimah.multiply.com>
- Rubin, A. &. (2008). *Research method in sosial work*. (6th ed.). California: Brooks Cole Publishing Company.
- Rubin, R. W. (2005, 2008). *Evaluating sosial work services and programs*. Boston: Pearson.
- Sheafor, B. a. (2003). *Technique and Guidelines for Sosial Work Practice (6th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sheafor, S. (2003, 1975). *Introduction to Sosial Work Practice*. New York. Mac Millan. . New York: Mac Millan.
- Soetarso. (1980). *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: KOPMA STKS.
- Suharto, E. (2006). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP Press.
- Sukoco, D. H. (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung: STKS.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, teori, model, standar aplikasi, dan profesi*. Jakarta: Rajawali.
- Woodside, M. d. (2003). *Generalist Case management. A method of human service delivery (2nd ed.)*. Pasific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning .
- Widodo, N. (2011). *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui RPSA*. Jakarta: P3KS Press.
- Widodo, N. (2009). *Studi Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui PSBR*. Jakarta: P3KS Press.
- Widodo, N. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial; Pembinaan lanjut (After care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: P3KS Press